

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adi Sulistyono. (2006). Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia. LPP. UNS
- AM, Suherman. (2001). Aspek Hukum dalam Ekonomi Global. Jambatan. Jakarta, hlm 31.
- Andi Hamzah. (2002). Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana. Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti. Jakarta. Hlm 37
- Apeldoorn. L.J Van. (1978). Pengantar Ilmu Hukum. Paradya Paramita. Jakarta.. Hlm. 90
- Arief, Barda Nawawi. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm.47
- Bahrudin Lopa. (2001). Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Penerbit Kompas. Jakarta.. Hlm. 53
- Bambang Poernomo. (1994). Asas – Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm/115
- Bardan Nawawi Arief. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung. Citra Aditya Bhakti. Hlm. 13
- D. Schaffmeister. (2010). sebagaimana dikutip i.g.m. Nurdjan, Korupsi – Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 68.
- Darsis Humah, (2003), dalam “ Jurnal Tata Negara: Prinsip Keadilan dan Feminisme”: Teori Keadilan John Rawls, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Djoko Prakoso. (1984). Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktik Peradilan. Ghalia Indonesia. Bandung. hlm. 196
- Efi Laila Kholis. (2010). Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi. cetakan pertama, Solusi Publishing.. Jakarta. April 2010. Hlm. 15
- Eva achjani Zulfa. (2011). Pergeseran Paradigma pembedaan, cetakan ke 1, lubuk agung, bandung,

- Hakim, amrie, (2002). "analisis hukum, jangan tunggu langit runtuh", justikasiar publika, Jakarta.
- Ichawan.M. (1989). Administrasi Keuangan Negara. Liberty. Jakarta. Thn.1989. Hlm. 27
- J.O Sahetapy, (1995). terjemahan dari Schaffmeter et al, Hukum Pidana, Liberty. Yogyakarta, Hlm. 39.
- Klitgaard, Robert. (2001). Membasmi Korupsi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hlm 41
- l. marpaung, (2001). tindak pidana korupsi pemberantasan dan pemecahannya,, djembatan, jakarta, hlm 2.
- Lexy J. Moleong, (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya. hal. 330
- Maria Farida Indrati Soeprapto. (1998). Ilmu Perundang-Undangan : Jenis Fungsi dan Muatan. Kanisius Yogyakarta. Hlm. 57-
- Martono, d. agus harjito, (2010) manajemen keuangan, cetakan kedelapan, ekonisa, Yogyakarta. Hlm. 20
- Muladi dan Barda Nawawi. (1998). Teoriteoridan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni, hal. 91
- P. A. F. Lamintang. (1990). Hukum Pidana Indonesia". Sinar Baru Bandung, Hal. 67,
- Peter M. Ward, (1989). *Corruption Development and Inequality*, First Published, Routledge, london, hlm. 20
- Peter Mahmud Marzuki, (2011). Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, Cet. 7.
- Poerwadarminta, W.J.S. (2003). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm.87
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. (2010). Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi,, Indonesia Lawyer Club, Surabaya. Hlm. 21
- R. Onggal Siahaan. (2015). Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya. Pusat Litbang Kejaksaan RI .
- R. Wiyono. (2012). Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika . Jakarta. Hlm 64

Satjipto Rahardjo. (1980). Hukum dan Masyarakat. Bandung. Angkasa.. Hlm. 117

Syaiful Bakhri. (2009). *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, cetakan 1, total media, Yogyakarta, hlm. 116

Van Apeldoorn dalam O. Sadino, (1985). Pengantar Ilmu Hukum. cetakan kedua puluh dua, Pradnya Paramita. Jakarta. hlm. 928

2. Artikel dalam majalah dan surat kabar

Ramli Atmasasmita. (2007). Pengembalian Aset Korupsi : Masukan Konvensi Internasional Anti Korupsi 2008. Koran Seputar Indonesia, Edisi Senin 13 Agustus 2007

Goedhart. Garis – Garis Besar Keuangan Negara. Terjemahan Ratmoko. Jakarta. Tahun 1972. Hlm.24

Harian Suara Pembaruan, agustus 2004, anggota dprd pun "melipat" uang rakyat.

Mungki Hadipratikto, Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Nestor Universitas Tanjungpura.

3. Halaman Web

M Ismail Yusanto, “islam dan jalan pemberantasan korupsi,” <http://b.domaindx.com/samil/2004/readnews.tajuk>. diakses pada tanggal 26 april 2016

Mudjia Rahardjo, Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>, diakses tanggal 12 April 2016

Ni. Komang Sutrisni. at.al. Pendekatan *Follow The Money* dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Tindak Pidana Lain. [Ojs.unud.ac.id > article > view file](http://ojs.unud.ac.id/article/view/file). Diakses pada. 12 Maret 2016

Novia chandra dewi, uang pengganti kurang karena koruptor pilih jalani hukuman subsider, dari website <http://www.detiknews.com>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2016

Rusman. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan.
[http : www.solusihukum.com/artikel/artikel45.php](http://www.solusihukum.com/artikel/artikel45.php)

Samodra Wibawa, “Korupsi : Sebab- Musabab dan agama,” [http : //www.geocities. comcom/ adeniha/ korup_ agama. htm](http://www.geocities.com/com/adeniha/korup_agama.htm). diakses pada tanggal 26 april 2016

Wisnu Subroto. Pertarungan Wewenang Polisi dan Jaksa dalam Menyidik Perkara Korupsi. Jaksa Agung Muda. Dalam Hukum Online edisi Rabu 20/04/2016.[http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol18538/wkma.yud/20/viii/2006/perihal_permohonan_fatwa_hukum. angka 1 dan 2.](http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol18538/wkma.yud/20/viii/2006/perihal_permohonan_fatwa_hukum_angka_1_dan_2)

Cik Hasan Bisri. Penelitian Hukum Terapan dalam Lingkungan Peradilan Agama. <http://www.fshuinsgd.ac.id/2012/03/01/penelitian-hukum-terapan-dalam-lingkungan-peradilan-agama/>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2016

Ernest Runtukahu. korupsi dalam konsep hukum formal dan konsep hukum material. *lex crimen* vol.i/no.2/apr-jun/2012. Diakses pada tanggal 19 Januari 2016

<http://m.tribunnews.com/nasional/2013/11/11/bpk-kerugian-keuangan-negara-capai-rp5698-t-pada-smester-1-2013> ; diakses pada tanggal 12 maret 2016

<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/27/17074431/.indeks.persepsi.korupsi.indonesia.bisa.lebih.tinggi.jika.kpk.tak.diganggu>. Diakses pada tanggal 29 Fabriari 2016

<http://www.jpnn.com/read/2015/10/08/331613/pengamat:-pengemplang-pajak-jarah-uang-negara-rp5.000-triliun>- Diakses pada tanggal 29 Fabriari 2016

<http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2015/10/08/345415/aneh-munculnya-ruu-pengampunan-nasional>. Diakses pada tanggal 29 Fabriari 2016

[https ://m. tempo.co/read/news/2012/03/ 26/](https://m.tempo.co/read/news/2012/03/26/). Diakses pada tanggal 16 februari 2016

www.bpk.gi.id/news/hasil-pemeriksaan-bpk-semester-i-tahun-2014; diakses pada tanggal 12 maret 2016

[www.hukumonline.com/pidana uang pengganti. htm](http://www.hukumonline.com/pidana_uang_pengganti.htm). diakses tanggal 1 maret 2016.

[www.kpk.go.id/id/tentang kpk.tupoksi.struktur organisasi/deputi pencegahan](http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/tupoksi-struktur-organisasi/deputi-pencegahan)